

### PROSES KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA (MAKN) SEBAGAI PILAR PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA BANGSA

#### PENULIS

<sup>1)</sup>Nuriyati Samatan, <sup>2)</sup>Daryani, <sup>3)</sup>Nurhasanah Haspiaini

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, untuk menelaah proses Komunikasi Antarbudaya Majelis Adat Kerajaan Nusantara sebagai pilar pelestarian adat dan budaya Bangsa. Metodologi: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Etnografi, pendekatan yang dikembangkan oleh Frazer, dilakukan dengan Langkah-langkah: Dokumentasi lapang; Interaksi dengan anggota kelompok yang diteliti; Meneliti arsip Sejarah; Dokumen Kebijakan. Temuan: Penelitian ini menemukan, Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), yang terbentuk sejak 2019, dan beranggotakan 57 Raja/Sultan Se-Nusantara, adalah gabungan dari Kerajaan dan Kesultanan Se-Indonesia. Organisasi MAKN telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00002.AH.02.03. Tahun 2019. Kiprah MAKN, salah satunya adalah menjaga tradisi dari masing-masing Kerajaan yang pernah ada di seantero Nusantara, baik Kerajaan dan Kesultanan Islam maupun Kerajaan yang berafiliasi pada agama dan budaya tertentu, agar tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun sebagai warisan budaya yang tidak ternilai, dan agar generasi muda tumbuh dalam budayanya, dan tetap menjadi dirinya sendiri di tengah gempuran berbagai budaya yang saat ini masuk pada sendi-sendi kehidupan, tanpa batas, yang jika dibiarkan, akan menjadikan generasi muda kehilangan identitas dan budayanya. Kebaruan Penelitian: penelitian ini membahas tentang kiprah organisasi Majelis Adat Kerajaan Nusantara sebagai pilar pelestarian adat dan Budaya Bangsa.

Kata Kunci

MAKN, Pelestarian Adat, Budaya Bangsa, Frazer

#### ABSTRACT

*Intercultural Communication Process Majelis Adat Kerajaan Nusantara as a Pillar of Cultural and Customary Preservation Objective: This study examines the role of the Majelis Adat Kerajaan Nusantara in safeguarding the customary practices and cultural heritage of the nation. Methodology: The research employs a socio-ethnographic approach adapted from Frazer, comprising four procedures: field documentation; sustained interaction with group members; examination of historical archives; and analysis of policy documents. Findings: The Majelis Adat Kerajaan Nusantara, established in 2019 and composed of fifty-seven rajas and sultans from across the archipelago, constitutes a formal association of kingdoms and sultanates throughout Indonesia. The organization is legally registered and ratified under the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00002.AH.02.03.2019. A central activity of the Majelis Adat is the protection and transmission of intergenerational traditions - both Islamic and other religious and cultural lineages - so that these invaluable cultural inheritances remain living practices. By maintaining customary rites and social forms, the Majelis seeks to ensure that younger generations develop within their cultural frameworks and retain distinct identities amid unbounded cultural flows that risk eroding local identity. Originality: This study contributes novel empirical insight by treating the Majelis Adat Kerajaan Nusantara as an organizational actor and cultural pillar for the preservation of national customs and heritage.*

Keywords

MAKN, Preservation of Customs, National Culture, Frazer

#### AFILIASI

Prodi, Fakultas  
Nama Institusi  
Alamat Institusi

<sup>1,2,3)</sup>Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Nasional

<sup>1,2,3)</sup>Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

#### KORESPONDENSI

Penulis  
Email

Nuriyati Samatan  
[nuriyatisamatan@gmail.com](mailto:nuriyatisamatan@gmail.com)

#### LICENSE



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Komunikasi Antarbudaya merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara orang-orang yang berbeda budaya (Samatan, 2014). Komunikasi Antarbudaya menjadi penting saat orang-orang yang berbeda budaya berada dalam sebuah relasi, dan menjadi penting untuk keberhasilan relasi jangka panjang. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses Komunikasi Antarbudaya, adalah

Indonesia merupakan negara yang dibangun melalui berbagai Kerajaan-kerajaan yang telah eksis jauh sebelum Indonesia Merdeka. Keberadaan berbagai Kerajaan Nusantara, adalah modal sosial yang sangat besar untuk Bangsa Indonesia (Fanty, 2019). Saat Indonesia Merdeka, Kerajaan Nusantara yang telah berumur ratusan tahun bahkan ribuan tahun, dan telah eksis jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kerajaan Hindu di Indonesia, tercatat telah eksis sejak Abad ke-4 M, atau sekitar tahun 350 M, yakni Kerajaan Kutai, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur (Zaini, 2019). Beberapa Kerajaan Hindu Budha di Indonesia, paling tidak tercatat sekitar 15 atau lebih Kerajaan, mulai dari Kutai Kartanegara, Kerajaan Tarumanegara di Bogor, Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Wijayadipura, Kerajaan Melayu, Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Salakanegera, dan beberapa Kerajaan Hindu Budha lainnya yang pernah eksis di Nusantara. Setelah Abad ke-12 atau Abad ke-13, dimulailah periode Kerajaan Islam di Nusantara menggantikan Kerajaan Hindu Budha yang juga eksis hingga Abad ke-13M.

Saat Indonesia Merdeka dari kekuasaan Belanda pada tahun 1945, Kerajaan-kerajaan berbasis Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Melalui dukungan Kerajaan Nusantara, Indonesia menuju kemerdekaan sesungguhnya. Karena, dengan kesadaran penuh sebagai bangsa, Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara kemudian bergabung secara sukarela dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak seperti Malaysia misalnya, keberadaan Kerajaan di Semenanjung Melayu ini masih dapat ditelusuri melalui Negara Bagian yang masih diperintah oleh Kerajaan sebelumnya, dan dengan demikian tidak menghilangkan sama sekali jenis, bentuk, dan hukum yang berlaku di beberapa Negara Bagian tersebut. Sementara, Indonesia menganut Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden, terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang dipilih secara demokratis, tidak terkait dengan Kerajaan yang memerintah sebelumnya. Di masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, hampir seluruh Kepala Daerah dipimpin oleh TNI, dan ini kemudian menjauahkan posisi Kerajaan untuk menjadi penentu kebijakan daerah. Hal ini menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran anak cucu Kesultanan dan Kerajaan Nusantara, untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang memberikan penguatan Kerajaan dan Kesultanan di Indonesia.

### 1.2 Komunikasi Antarbudaya

Kajian Komunikasi Antarbudaya digagas oleh Asante pada sekitar tahun 1980 (Samatan, 2014). Kajian komunikasi antarbudaya semakin berkembang pada tahun 1983 melalui jurnal *International and Intercultural Communication Annual* memuat karya tulis mengenai komunikasi antarbudaya. Karya pertama yang dimuat dalam jurnal tersebut berjudul Teori Komunikasi Antarbudaya oleh Gudykunst pada tahun 1983 dan 1988 (Gudykunts, 2003), selanjutnya karya mengenai Metode Penelitian Komunikasi Antarbudaya oleh Gudykunst dan Kim pada tahun 1984, yang menjadi penanda Komunikasi Antarbudaya sebagai bagian dari Science of Communications.

Beberapa asumsi Komunikasi Antarbudaya, adalah: [1] Perbedaan persepsi; bahwa dalam komunikasi antara dua kelompok atau dua orang yang berbeda budaya, kemungkinan terjadi perbedaan cara berpikir dan menginterpretasi pesan dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung; [2] Isi dan relasi antarbudaya, komunikasi Antarbudaya sering kali mencakup isi dan relasi antarpribadi yang dapat memengaruhi pesan diterima dan dipahami; [3] Tujuan Komunikasi: Komunikasi Antarbudaya bertujuan mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman; [4] Berpusat pada kebudayaan: Komunikasi Antarbudaya berpusat pada kebudayaan dan nilai-nilai yang ada pada masing-masing budaya; [5] Efektivitas Antarbudaya: Efektivitas antarbudaya merupakan tujuan utama dari proses Komunikasi Antarbudaya.

### 1.3 Teori Identitas Sosial

Teori Identitas Sosial mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Henry Tajfel dan John Turner pada tahun 1970-an dan 1980-an (Turner dan Oakes, 1986), dengan membangun 4 asumsi utama: [1] Kategori sosial; [2] Identifikasi sosial; [3] Perbandingan sosial; dan [4] Bias in Group. Teori Identitas Sosial, dalam

kajian Tajfel dan Turner, adalah kelompok yang membangun identitas dirinya berdasarkan atas berbagai persamaan dalam kelompok sosial, yang membedakan kelompok dengan kelompok lain. Kelompok sosial ini juga cenderung menyukai dan membela kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. Teori Identitas Sosial pada akhirnya berusaha untuk menjelaskan proses kognitif dan kondisi sosial yang mendasari perilaku antar kelompok, terutama yang terkait dengan prasangka, bias, dan diskriminasi. Teori ini bisa membantu memahami bagaimana identitas budaya dan adat istiadat memperkuat solidaritas kelompok. Adapun tahapan dalam Teori Identitas Sosial, digambarkan sebagai berikut:



- 1) *Kategori sosial*, adalah kecenderungan orang untuk mengklasifikasikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam berbagai kelompok sosial berdasarkan atribut seperti ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau agama.
- 2) *Identitas Sosial*, adalah proses seseorang atau sekelompok orang mengadopsi identitas kelompok tersebut. Ini berarti mereka mulai melihat diri mereka dan mengadopsi norma, nilai, dan perilakunya.
- 3) *Perbandingan sosial*, merupakan proses akhir, dimana seseorang yang telah mengategorikan dan mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok, individu membandingkan kelompok mereka dengan kelompok lain. Perbandingan ini sering kali akan mendukung kelompok mereka sendiri, yang mengarah pada favoritisme kelompoknya sendiri.

Ketiga kategori tersebut, akan dijadikan sebagai alat analisis terhadap kontekstualisasi keberadaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), dalam kiprahnya dalam menjadi garda terdepan dalam pelestarian adat dan budaya Bangsa Indonesia.

#### 1.4 Kerajaan Indonesia sebagai Modal Sosial

Modal sosial dikenalkan oleh Pierre Bourdieu, melalui karyanya “Outline of a Theory of Practice” (1972), mengidentifikasi setidaknya empat komponen modal sosial, yakni: [1] Jaringan Sosial; [2] kepercayaan; [3] Kerjasama; [4] norma sosial. Modal sosial bagi Nourdieu, memiliki beberapa fungsi, yakni: [1] Meningkatkan kepercayaan antara individu dengan kelompok; [2] Meningkatkan kerja sama dalam kelompok sosial; [3] Meningkatkan kesejahteraan individu dan Masyarakat; [4] Meningkatkan ekonomi pada individu dan kelompok.

Kerajaan dan Kesultanan yang pernah ada di Nusantara sejak Abad ke-4, merupakan modal sosial bagi Bangsa Indonesia yang berarti, Indonesia sebagai bangsa, telah memiliki akar Sejarah yang kuat, karena keberadaan Indonesia tidak berdiri di ruang hampa, tetapi telah dibangun di atas landasan yang kokoh melalui Sejarah panjang yang dilalui, baik sebagai Masyarakat maupun sebagai bangsa-bangsa yang berdaulat. Keberadaan Kerajaan Nusantara, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, telah memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat, untuk dapat berdiri di atas identitasnya sendiri, dan menjadi bangsa yang berdaulat atas berbagai kekayaan yang merupakan modal sosial bangsa untuk membangun identitas yang kuat.

Jumlah Kerajaan yang pernah berdaulat di Indonesia, belum terbukukan secara pasti, banyak data dengan banyak. Taniputra (2017) mencatat terdapat lebih dari 50 Kerajaan di Nusantara, namun sumber lain menyebutkan lebih dari 500 Kerajaan pernah eksis di Nusantara. Dengan demikian, masih perlu pembuktian dan penulisan tentang Kerajaan-Kerajaan di Nusantara. Saat ini yang dibutuhkan adalah negara melalui kementerian dapat melakukan identifikasi dan penulisan ulang akan Kerajaan-Kerajaan di Nusantara, atau melalui Pemerintah Daerah masing-masing, sebagai bentuk tanggungjawab agar data tentang identitas Kerajaan di Nusantara tidak lenyap dalam pusaran waktu.

#### 1.5 Pelestarian Adat

Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis namun sangat mengikat. Adat istiadat dalam satu daerah merupakan identitas bagi warganya, menjadi pembeda antara satu suku bangsa dan yang lainnya, dan juga menjadi perekat serta identitas bagi warganya. Berbagai kajian mengenai adat Nusantara, menunjukkan bahwa tatanan dalam sebuah komunitas budaya diatur secara tidak tertulis melalui nilai-nilai adat istiadatnya. Penemuan Samatan (2023), menunjukkan, Masyarakat adat Banggai secara garis besar masih mengidentifikasi dirinya sebagai “Orang Banggai”, terutama pada kalangan generasi yang lebih tua, sementara, pada generasi muda, kebanyakan telah banyak yang hilang, karena tidak ada sosialisasi dan

internalisasi dari keluarga dan Masyarakat, khususnya penggunaan Bahasa Banggai (Samatan, et al., 2022). Penelitian Samatan, et al. menunjukkan, Bahasa Banggai nyaris punah, dan Bahasa sebagai identitas utama pada sebuah etnis, menjadikan etnis Banggai nyaris kehilangan identitas terutama di kalangan generasi muda. Penelitian Etnis Banggai, hanyalah salah satu dari sekian banyak etnis yang menghadapi persoalan yang sama, jika identitas budaya tidak diinternalisasikan oleh komunitas tersebut, baik melalui keluarga, Masyarakat dan institusi Pendidikan, perlanaan tapi pasti generasi berikutnya akan kehilangan budayanya dan akan membahayakan bagi identitas bangsa tersebut secara keseluruhan.

Pelestarian adat pada komunitas budaya, banyak dilakukan melalui budaya tutur, seperti dalam budaya “*banunut*”/mendongeng pada Masyarakat Banggai (Samatan, et al., 2024). Sehingga, banyak budaya yang tidak disosialisasikan, akan mudah hilang dalam kehidupan generasi selanjutnya. Selain Bahasa tutur, identitas budaya yang hingga saat ini masih lekat dalam komunitas budaya, adalah proses ritual (Samatan, et al., 2023), karena dengan proses ritual yang dilakukan secara berulang-ulang, dan dalam tradisi dilakukan setahun sekali, menjadikan tradisi akan selalu diingat, dan dilafalkan, dan dilakukan dari generasi ke generasi. Beberapa budaya dilestarikan melalui “mitos”, berupa kepercayaan rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui taboo, atau melalui cerita rakyat, sebagaimana mitos tentang Boki Sea yang hingga saat ini menjadi bagian dari kepercayaan yang samar-samar, pada sebagian komunitas Banggai (Samatan & Abdul Barry, 2020). Keberadaan mitos yang diyakini oleh komunitas, akan memengaruhi kepercayaan tentang berbagai hal dalam komunitas tersebut. Myth of Boki Sea, misalnya memberikan posisi penting terhadap keberadaan komunitas budaya. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, maka keberadaan identitas budaya dan komunitas budaya tersebut akan semakin tidak jelas.

Pelestarian adat di Indonesia, saat ini hanya dilakukan oleh komunitas adat tertentu secara parsial, seperti dalam penelitian Mei et al., (2025), Samatan et al., 2024, yang menemukan bahwa Masyarakat adat, melalui budaya mereka masing-masing, dan memiliki tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan secara tidak langsung telah berperan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian Mei et al., (2025), menemukan bahwa suku Baduy, Dayak, Ammatoa Kajang, komunitas Sasi di Maluku, dan masyarakat Subak Bali, tradisi yang lekat dengan komunitas ini mengandung nilai-nilai pelestarian seperti zonasi kawasan, rotasi pemanfaatan sumber daya, ritual spiritual, dan sanksi adat yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungannya. Samatan, et all., menemukan bahwa tradisi pada Suku Banggai yang membiarkan lahan yang telah digunakan beberapa kali untuk berkebun, dan dibiarkan selama minimal 5 tahun untuk dapat digunakan kembali, adalah bagian dari siklus hidup untuk peremajaan tanah kebun, membiarkan lahan untuk subur kembali, dan siap untuk ditanami kembali tanpa harus menggunakan pupuk yang dapat merusak struktur tanah. Kajian Noya (2023), menemukan bahwa penerapan Sasi yakni ritus yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, kematian dan pewarisan, yang dilakukan melalui Lembaga Adat Kewang di Maluku, telah memberikan andil terutama pada pelestarian lingkungan, karena setiap pelanggaran akan ada sanksi hukum Adat yang diberlakukan terhadap orang per orang maupun kelompok yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Aturan Adat yang berlaku pada Suku Banggai sebagaimana kajian Samatan, et all., (2023), walaupun tidak ada aturan tertulis, namun temuan menunjukkan, Masyarakat, terutama mereka yang berada di pedalaman, hingga saat ini masih mematuhi aturan adat tersebut, sementara pada Masyarakat kota, aturan tersebut masih diketahui, namun banyak yang tidak diimplementasikan lagi.

## 1.6 Budaya Bangsa Indonesia

Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan beragam budaya, sehingga semboyan Bangsa Indonesia adalah *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tapi tetap satu. Sebuah semboyan yang diadaptasi dari Bahasa Jawa Kuno, diusulkan Sukarno pada tahun 1950 (Wawasan Kebangsaan, 2021), dan ditetapkan sebagai semboyan resmi Bangsa Indonesia pada 1951. Artinya, sejak awal, para pendiri Bangsa telah sadar akan kebhinnekaan suku Bangsa dan budaya Indonesia.

Menurut laman Indonesia.go.id (2023), terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia, artinya, setiap suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tulisan Asvina dan Ofilia (2016), menyatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia tidak hanya dalam warisan benda, namun juga dalam bentuk budaya tak benda. Di dalamnya termasuk artefak, pakaian, nilai, tradisi lisan dan tulisan, seni dan lainnya. Selain itu, termasuk teknologi, Dalam kajian Samatan (2020), budaya juga diwariskan melalui “mitos” yang berkembang dalam Masyarakat, dan menjadi bagian dari kepercayaan sebagian Masyarakat. Budaya suku bangsa yang sangat krusial dan menjadi identitas komunitas, adalah “Bahasa”, yang perlu dilestarikan oleh penutur masing-masing etnis. Bahasa daerah, saat ini mengalami degradasi dan

penurunan penutur pada generasi muda, dan perlu mendapat perhatian dari komunitas local dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Salah satu kekayaan bangsa dan menjadi bagian dari identitas Bangsa Indonesia, yang sangat disayangkan jika tidak dipelihara oleh komunitasnya sendiri.

Budaya yang kuat, akan menjadikan komunitas local akan tumbuh dan mengidentifikasi dirinya menjadi kuat, kokoh serta menjauhkan generasi muda menjadi bias dan gamang kehilangan identitas budaya. Pembentukan budaya dalam diri seseorang, akan membantu dirinya untuk tetap berada dalam koridor kebudayannya, dan diharapkan akan menjadi pribadi yang kuat, jauh dari perbuatan menyimpang karena terdapat identitas yang kuat melalui budaya (Samatan, 2022).

Penelitian Samatan, (2023), menunjukkan, bahwa setiap suku bangsa sejaknya membuat “blue print” untuk identitasnya suku bangsa masing-masing, yang dapat diwariskan secara terstruktur melalui jenjang sekolah formal dan non-formal. Dengan adanya blue print yang dibuat oleh pemangku kepentingan, diharapkan budaya bangsa masing-masing suku bangsa dapat terbukukan, dan dapat menjadi bagian dari Upaya melestarikan budaya bangsa secara keseluruhan. Samatan (2023) menemukan, kelemahan dari berbagai Suku Bangsa di Indonesia, terutama dengan penutur Bahasa yang lebih kurang 200.000 atau kurang dari itu, cenderung kehilangan identitas karena kurangnya penutur Bahasa, selain itu, Bahasa Indonesia yang telah disosialisasikan dengan baik oleh Soeharto pada awal tahun 1970-1980-an, telah berlangsung dengan baik, namun di satu sisi, banyak komunitas adat yang kemudian kehilangan penutur dari kalangan mereka sendiri (Samatan, 2023).

Kebutuhan akan *Blue Print* dari masing-masing komunitas budaya, merupakan kebutuhan yang sangat urgent, dan dalam beberapa komunitas, diperlukan bantuan pemerintah, untuk mendokumentasikan, membuat catatan terstruktur dari berbagai budaya dan kearifan local masing-masing entitas budaya. Banyaknya entitas budaya di Indonesia, menyebabkan proses dokumentasi dan penulisan secara terstruktur dari kegiatan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Perlu kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, Masyarakat local, penggiat budaya dan LSM untuk bekerja sama dalam membuat dokumentasi dari sekian banyak berbagai budaya benda dan tak benda dalam komunitas budaya masing-masing.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio-Etnografi, pendekatan yang dikembangkan oleh Frazer (Abad ke-20), yang dikembangkan oleh beberapa ahli, antaranya adalah Kuper (2000), dilakukan dengan Langkah-langkah: [1] Dokumentasi lapang; [2] Interaksi dengan anggota kelompok yang diteliti; [3] Meneliti arsip Sejarah; [4] Dokumen Kebijakan. Dokumentasi dilakukan melalui beberapa file yang dikirimkan melalui grup WhatsApp, interaksi intensif dengan anggota kelompok MAKN, meneliti situs web yang memuat kegiatan MAKN, dan beberapa dokumen kebijakan yang diberikan kepada peneliti dari pengurus MAKN. Wawancara terbatas juga dilakukan kepada pengurus MAKN dan beberapa pengurus lainnya, khususnya kepada Sekjen dan Dewan Pakar MAKN.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kiprah MAKN Menjaga Tradisi

Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), dibentuk pada Agustus 2019, oleh 36 deklarator, dan telah berbadan Hukum dengan Nomor: AHU-00002.AH.02.03.Tahun 2019 (Puri Agung Denpasar, 2019). Organisasi didirikan antaranya untuk wadah menjalin Kerjasama, mempertahankan budaya leluhur, menjaga keberadaan warisan budaya Kerajaan Nusantara yang sangat kaya, mulai dari budaya benda dan budaya tak benda, yang akan hilang ditelan waktu, jika tidak ada Upaya untuk melestarikannya.

Saat organisasi didirikan, beberapa syarat untuk bisa masuk menjadi anggota adalah:

- 1) Memiliki silsilah turun-temurun yang disahkan oleh Kerajaan/Kesultanan asalnya.
- 2) Rekomendasi kekerabatan syah dari Kerajaan/Kesultannya.

Proses menjadi anggota organisasi MAKN adalah:

- 1) Calon anggota mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- 2) Pengurus melakukan verifikasi dokumen dan kunjungan langsung ke Kerajaan pemohon.
- 3) Sekjen dan Ketua Harian merekomendasikan kepada Dewan Kerajaan Deklarator.
- 4) Dewan Kerajaan Deklarator memutuskan Diterima/Ditolak.
- 5) Pengurus menginformasikan keputusan Dewan Kerajaan Deklarator kepada pemohon.

Persyaratan dibuat khusus, untuk mencegah elemen Masyarakat atau kelompok/perorangan yang sesungguhnya tidak memiliki Kerajaan atau tidak memiliki silsilah turun temurun yang berafiliasi pada

Kerajaan tertentu, karena klaim perlu ada pembuktian secara dokumen, baik dokumen tertulis, atau yang tidak tertulis dan terverifikasi.

Berdasarkan proses Teori Identitas Sosial, menunjukkan bahwa pembentukan organisasi MAKN adalah untuk melakukan kategori sosial, dengan mengidentifikasi diri sebagai keturunan Kerajaan Nusantara, berasal dari salah satu Kerajaan yang dapat diverifikasi. Kebutuhan untuk berada dalam sebuah organisasi MAKN adalah untuk memudahkan melakukan identifikasi sosial, antara mereka yang benar-benar berasal dari keturunan Kerajaan, atau mereka yang hanya memberikan pengakuan tanpa ada bukti autentik. Pengakuan ini tentunya didasarkan atas berbagai kepentingan dari orang atau kelompok dan golongan tertentu.

Fase selanjutnya adalah sebagai perbandingan, antara yang mereka yang berasal dari keturunan Kerajaan, dan mereka yang hanya “mengakui” sebagai keturunan raja/Kerajaan. Kegunaannya adalah untuk dapat melakukan verifikasi dan juga kejelasan atas mereka yang tidak berada dalam kelompok tersebut sebagai perbandingan yang nyata antara keduanya.

Menurut Sekretaris MAKN, Hj. Yani, menyatakan bahwa saat ini banyak yang tumpang tindih, baik perorangan yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan raja pada satu Kerajaan tertentu, maupun terdapat intervensi pemerintah, yang kemudian mengajukan kepada MAKN meminta untuk mendapatkan penetapan berupa SK dari MAKN, dan bergabung dengan organisasi MAKN.

Seperti yang dikemukakan oleh Sekjend MAKN, organisasi ini selalu melakukan rapat koordinasi setiap tahun, selain untuk memperkokoh solidaritas antar sesama Kerajaan Nusantara, juga untuk membahas berbagai masalah yang muncul, baik di lingkungan internal, dan juga eksternal, terutama terkait dengan kekuasaan. Karena, menurut Sekjend MAKN, kadang pemerintah tidak memahami apa yang menjadi concern MAKN yang ingin tetap menjaga kemurnian “trah” Kerajaan, mengeliminir berbagai kepentingan, baik kelompok maupun kekuasaan, yang mencoba masuk pada kewenangan MAKN dengan berbagai kepentingan.

Setiap tahun, MAKN melakukan berbagai kegiatan, tahun 2025, dilakukan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Pengukuhan Dewan Penasehat & Kehormatan, serta Musyawarah Madya (Musdy) IV MAKN 2025 di Ndayu Park, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dilaksanakan 26-28 September 2025 (voi.id. 2025). Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum MAKN, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi SH, MM dari Karaton Surakarta Hadiningrat menyatakan, bahwa MAKN “tidak hanya berfokus pada pelestarian tradisi, MAKN juga menegaskan kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan, diplomasi budaya, hingga agenda pembangunan berkelanjutan” (voi.id. 2025).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Sekjen MAKN pada Oktober 2025, adalah menghadiri penobatan Raja Bokeo Mekongga ke-XXI, pada 25 Oktober 2025, di Kolaka. Sekjen MAKN, YM Dra. Hj. Yani, menghadiri pelantikan tersebut, sebagai bentuk dukungan, apresiasi dan juga memastikan bahwa Raja dan Ratu yang dilantik adalah keturunan asli dari Kerajaan tersebut.



**Gambar 1. Prosesi Pelantikan Raja Bokeo Mekongga ke-XXI**  
Sumber: Media Kendari, 2025

Gambar 1 menunjukkan prosesi pelantikan Raja dan Ratu Mekongga pada Oktober 2025, di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kehadiran Sekjen YM Dra. Hj. Yani, menunjukkan keaslian keturunan dari Raja dan Ratu baru yang dilantik. Karena, Sekjen MAKN akan secara selektif mengikuti berbagai rangkaian kegiatan terkait dengan pelantikan, dan calon Raja dan Ratu yang akan dilantik akan mengundang Pengurus Pusat MAKN.

Secara selektif, Sekjen akan mencari informasi tentang silsilah Kerajaan yang akan melantik Raja dan Ratu yang baru, dan undangan akan dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakati MAKN yang juga merupakan representasi dari seluruh Kerajaan di Indonesia.

Raja dan Ratu yang akan dilantik, akan mengirimkan dokumen yang menjadi syarat untuk menjadi anggota MAKN, yang berarti, legalitas sebagai keturunan asli dari Kerajaan dimaksud telah melalui verifikasi oleh pengurus Pusan MAKN dan selanjutnya adalah kehadiran pengurus MAKN yang menjadi penanda bahwa Raja dan Ratu yang dilantik adalah sah dan mendapat legitimasi dari pengurus MAKN, Pemerintah Daerah dan Masyarakat budaya secara keseluruhan.

Perjalanan MAKN sebagai sebuah Lembaga yang dibangun untuk menjaga kelestarian budaya dan adat Nusantara, telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk membentuk Lembaga khusus di bawah Presiden, untuk menjadi wadah koordinasi, pengelolaan dan optimalisasi asset Kerajaan untuk kepentingan Bangsa (Ujarancom. 2025), pada Musyawarah Madya MAKN, yang berlangsung di Sragen, September 2025. Rekomendasi ini lahir dari kedulian MAKN tentang pentingnya pelestarian budaya Bangsa Indonesia yang beragam dan kaya. MAKN juga sadar akan keterbatasan dana Kerajaan, karena dengan masuknya seluruh Kerajaan Nusantara menjadi bagian integral Negara Republik Indonesia, pengelolaan anggaran tidak berada lagi pada Kerajaan tersebut. Hadirnya Kerajaan saat ini hanya menjadi "symbol" pemersatu identitas etnis yang ada di dalamnya, sementara seluruh kekayaan Kerajaan, telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari kedulian dan tanggung jawab Negara dan Bangsa Indonesia.



**Gambar 2. Musyawarah Madya MAKN**

Sumber: ujaran.com. 2025

Pada Gambar 2 terlihat, Ketua Umum dan Sekjen MAKN hadir dalam Musyawarah Madya MAKN, dan melahirkan beberapa Rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Rekomendasi yang dibacakan oleh Bendahara Umum DPP MAKN yang baru dilantik Andi Rukman N. Karumpa, menyatakan: "Rekomendasi yang kita rumuskan Bersama ini mulai dari penguatan lembaga adat, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, hingga digitalisasi warisan budaya adalah bukti bahwa kerajaan Nusantara siap hadir memberi kontribusi nyata. Semua ini bukan sekadar untuk masa kini, tetapi untuk memastikan warisan leluhur tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang." (Karumpa, dalam Ujaran.com. 2025).

### 3.2 Pelestarian Budaya melalui Kiprah MAKN

Sejak terbentuknya organisasi MAKN pada 2019, secara berkala MAKN membuat berbagai kegiatan, untuk menjadikan seluruh Kerajaan yang terhimpun dalam organisasi ini menjadi makin solid, serta membuat berbagai kegiatan yang menjadikan eksistensi Kerajaan serta budaya Nusantara semakin dikenal luas, baik di Tingkat nasional maupun Internasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Umum MAKN KPH Eddy Wirabhumi: "sebagai organisasi yang menaungi kerajaan-kerajaan di Indonesia, MAKN memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan budaya lokal di tingkat nasional dan internasional" (Antaranews.com, 2025). Kegiatan Festival Budaya, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh MAKN, bertujuan untuk memperkenalkan budaya Nusantara melalui representasi Kerajaan Kerajaan Nusantara.

Selain itu, setiap ada pengukuhan Raja/Ratu baru di seluruh Indonesia, representasi pengurus MAKN, biasanya dihadiri oleh Sekjen MAKN, Ibu Dra. Hj RA MGAD Yani Wss Kuswodijoyo, yang selalu menyiapkan waktu, tenaga dan dana dan juga pikiran untuk merawat dan melestarikan budaya Nusantara

melalui keberadaan Kerajaan Nusantara di bawah naungan MAKN. Pertemuan secara berkala, dilakukan secara tatap muka maupun lewat tautan zoom meeting, untuk membahas berbagai masalah yang sedang terjadi, dan juga rencana ke depan yang ingin dilakukan oleh MAKN.

Dalam setiap kegiatan, kehadiran berbagai elemen, misalnya melalui Dewan Pakar MAKN yang terdiri atas personal dari berbagai Perguruan Tinggi Tanah Air, para mantan pejabat dan dosen aktif, bergabung Bersama untuk memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat MAKN dalam menyelesaikan persoalan, memperkuat MAKN melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan yang dianggap relevan dengan visi dan misi MAKN. Salah satu yang menjadi pembahasan saat ini, adalah “pengaliran” Pemerintah terhadap keberadaan Kerajaan Nusantara, dan hanya mengakui keberadaan Keraton Yogyakarta dan Solo, menjadi bagian yang dianggap sangat mencederai keberadaan Kerajaan Nusantara, yang dalam hal ini selain tergabung dalam organisasi MAKN, juga diakui keberadaannya, bahwa Kerajaan-kerajaan ini masih eksis. Diharapkan, Pemerintah memberikan bantuan, bimbingan agar Kerajaan Nusantara yang menyimpan berbagai kebudayaan, baik benda maupun tak benda, hidup kembali dalam ruang publik, baik secara regional dan nasional, dan menjadi bagian dari kekayaan Indonesia.

Salah satu yang diupayakan, adalah melakukan pembicaraan dengan pemerintah, dan menunjukkan kepada Pemerintah, bahwa Kerajaan Nusantara masih eksis secara symbol, walaupun tidak memiliki kekuasaan lagi, karena pilihan Kerajaan Nusantara untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia, yang berlangsung secara gradual, sejak tahun 1945. MAKN mengharapkan agar Pemerintah tetap mengakui keberadaan Kerajaan-Kerajaan Nusantara ini, dan dapat memberikan ruang untuk hidup, membina komunitasnya masing-masing, satu dengan lainnya dapat sejarah dan dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia ke depan, melalui kekayaan Nusantara.

Kegiatan yang juga menjadi concern dari MAKN terkait penguatan budaya, antara lain juga dengan kehadiran Sekjen MAKN pada peresmian Identitas Kabupaten Sumenep sebagai “Kota Keris”, melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang City Branding Kota Keris Kabupaten Sumenep. Pengesahan Perbup ini dipandang penting sebagai tonggak dalam upaya menjaga, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya keris sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sumenep.

Kehadiran Sekjen MAKN dalam kegiatan City Branding Kota Sumenep, menunjukkan konsistensi baik sebagai personal maupun Sekretaris Jendral, untuk menjaga warisan budaya leluhur dari masing-masing Kerajaan. Keberadaan identitas “Kota Keris” menunjukkan kesadaran budaya dari Pemerintah Daerah Sumenep, terlepas apakah Bupati saat ini adalah keturunan Kerajaan Sumenep atau bukan. Kesadaran Pemerintah Daerah dengan menetapkan City Branding Kabupaten Sumenep sebagai Kota Keris, menunjukkan identitas budaya Masyarakat Sumenep, yang dengan penetapan ini, akan menjadi bagian dari pewarisan nilai ke generasi selanjutnya dan juga kepada setiap wisatawan, baik dalam maupun luar negeri akan keberadaan dan identitas “Keris” Kabupaten Sumenep.



**Gambar 3: Sekjen MAKN menghadiri Peresmian Identitas Kabupaten Sumenep sebagai “Kota Keris”**

Sumber: gosumenep.com. 2025

Kehadiran Sekjen MAKN (ketiga dari kiri), menunjukkan concern secara pribadi maupun organisasi, untuk mendukung pada setiap pelestarian Budaya Bangsa, yang sekalian menjadi identitas Masyarakat dan komunitas masing-masing.

### 3.3 Komunikasi Antarbudaya pada MAKN

Proses Komunikasi Antarbudaya berlangsung pada MAKN, melalui interaksi Pengurus Pusat dengan sejumlah Kerajaan di Nusantara, baik yang berafiliasi Kerajaan Islam, Hindu maupun Budha. Dari 57 Anggota Kerajaan MAKN di seluruh Nusantara, mayoritas berbasis Kerajaan Islam, walaupun untuk Kerajaan yang berada di Bali, berafiliasi pada Hindu dan Budha. Proses Komunikasi Antarbudaya terjadi pada pengurus MAKN dengan berbagai budaya pada mereka yang berada dalam naungan Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

Komunikasi yang intens antara pengurus dan anggota MAKN, memerlukan kesepahaman yang tinggi antar orang-orang yang berinteraksi, agar apa yang diharapkan, dicita-citakan, yang menjadi tujuan Bersama dapat tercapai dengan baik. Proses komunikasi yang terjadi di dalam MAKN memerlukan kesepahaman, karena masing-masing anggota memiliki latar belakang, budaya dan nilai-nilai yang berbeda antara satu dengan lainnya. Selain itu, pengurus maupun anggota MAKN merupakan orang-orang yang berbeda budaya, memiliki pemahaman tentang sesuatu yang mungkin berbeda berdasarkan pemahaman, latar belakang dan juga perspektif budaya masing-masing.

Untuk dapat bertahan dan dapat menggalang seluruh kekuatan yang ada, merupakan keniscayaan untuk dapat bekerja sama dalam jangka panjang. Berada dalam satu organisasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, bukan hal yang mudah, perlu ada kesepahaman, saling memahami antar komunitas budaya, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara Bersama-sama. Beberapa event yang dilakukan secara berkala, misalnya Kirab Budaya, kunjungan rutin kepada Anggota MAKN merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, agar antara pengurus dapat saling mengenal secara baik, menjaga kohesivitas antara sesama anggota organisasi. Kesatuan Langkah antara anggota dan pengurus MAKN, menjadikan organisasi secara internal akan lebih kuat, dan dapat menyuarakan lebih banyak kepentingan baik melalui proses komunikasi vertikal maupun horizontal, untuk berbagai tujuan dan kepentingan Bersama, baik untuk organisasi, anggota kelompok dan komunitas Masyarakat secara lebih luas.

### 3.4 Analisis melalui Teori Identitas Sosial

Teori Identitas Sosial, dikembangkan oleh Tajfel dan Turner sejak tahun 1970-an dan 1980-an, menyebutkan asumsi-asumsi teori ini, yakni: [1] Kategori sosial; [2] Identifikasi sosial; [3] Perbandingan sosial; dan [4] Bias in Group.

Dalam konteks Kategori Sosial, berbagai kebijakan dan kegiatan MAKN, menunjukkan, bahwa keberadaan MAKN dalam melakukan kategorisasi sosial, dilakukan melalui berbagai “rambu-rambu” yang dibuat untuk melakukan penyaringan terhadap keberadaan keturunan “Raja yang sah” dengan beberapa kategori yang dibuat, jika sekelompok orang mengajukan dan mengklaim sebagai keturunan Raja dan ingin mengajukan pengakuan dari MAKN, dan menghadiri pengukuhan sebagai Raja. Dengan adanya syarat yang telah ditetapkan, hal ini menjadikan pengajuan dari sekelompok orang, tidak semua dapat disetujui. Atau bahkan, ada yang telah melakukan upacara penobatan sebagai “Raja” di tempat tertentu, namun tetap dianulir oleh MAKN, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, hingga saat ini, dualisme dalam Kerajaan Nusantara, masih tetap terjadi. Ada yang terselesaikan oleh waktu, namun ada yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Namun, MAKN tetap bersikukuh, untuk tetap pada koridor yang telah ditetapkan, dan dianggap telah sesuai dengan kajian etis yang dilakukan oleh organisasi ini.

Selanjutnya, Identifikasi sosial, menunjukkan, bahwa keberadaan MAKN sebagai garda terdepan dalam menjaga tradisi dan budaya Indonesia, diwujudkan dengan diversifikasi dan memelihara keberagaman, melalui pemeliharaan terhadap eksistensi dan keberadaan Kerajaan Nusantara, serta berbagai kekayaan budaya yang sebagian besar masih terpelihara, dan sebagian yang sedang diupayakan untuk tetap hidup dalam masyarakatnya masing-masing.

Perbandingan sosial, dapat ditelusuri melalui pemberian ruang terhadap berbagai budaya Nusantara melalui Kerajaan-Kerajaan yang dianggap “sah” dan mewakili budaya mereka masing-masing. Keragaman budaya yang diakui eksistensinya, menyebabkan masing-masing etnis yang mewakili keberadaan budayanya, akan dapat memberikan perbandingan sosial antara satu dengan lainnya. Perbandingan sosial dalam perspektif Tajfel dan Turner, akan membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan akan memberikan penguatan dan solidaritas pada sesama kelompok. Saat terjadi pertemuan di Tingkat Nasional yang dilakukan oleh MAKN, dengan sendirinya, kelompok-kelompok berbeda akan merasa “satu dan Bersama” dalam naungan Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dan merasa Bersatu dalam keberagaman.

Terjadinya bias, sebagai asumsi ke-empat, dapat saja terjadi dalam kehidupan sosial, jika keberadaan Kerajaan Nusantara tidak berada dalam satu payung organisasi yang menjadi wadah untuk menyatukan

berbagai perbedaan, persepsi, dan pandangan budaya masing-masing. Bias dalam kelompok-kelompok sosial, khususnya dalam Kerajaan Nusantara, akan terjadi jika tanpa keberadaan organisasi MAKN. Dengan demikian, bias akan diselesaikan melalui payung organisasi.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan, bahwa keberadaan organisasi MAKN visi dan misi utamanya adalah menjadi garda terdepan dalam mengawal tradisi yang diwariskan secara turun temurun, agar lestari sepanjang keturunannya masih ada. Melalui Teori Identitas sosial ditemukan, bahwa kehadiran organisasi MAKN sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Kerajaan Nusantara, adalah untuk melakukan kategori sosial, selanjutnya melakukan identifikasi sosial dan sebagai pembanding antara mereka yang benar-benar keturunan Kerajaan dan klaim orang-orang tertentu sebagai mereka yang berasal dari Kerajaan tertentu untuk kepentingan personal/sosial dan kelompok tertentu. Proses Komunikasi Antarbudaya, secara internal secara internal diperlukan, melalui berbagai pertemuan dan event budaya yang digagas oleh organisasi, serta kunjungan pengurus MAKN ke berbagai daerah, untuk dapat lebih saling memahami, membangun kohesivitas, melalui Komunikasi Antarbudaya.

#### REFERENSI

- Antaranews. (2024). Majelis Adat Kerajaan berkomitmen jaga tradisi Nusantara, diakses pada 21 Oktober 2025, melalui: <https://www.antaranews.com/berita/4535610/majelis-adat-kerajaan-berkomitmen-jaga-tradisi-nusantara>
- Fanthy, Rusydan. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat, *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3(2), pp. 35-53.
- Gosumenep.com. (2025). Sumenep Perkuat Identitas Diri sebagai Kota Keris, Perbup Nomor 58 Tahun 2025 Resmi Disahkan, diakses pada 29 Oktober 2025, melalui: <https://gosumenep.com/sumenep-perkuat-identitas-diri-sebagai-kota-keris-perbup-nomor-58-tahun-2025-resmi-disahkan/>
- Gudykunst, William B. (2003). *Cross-Cultural and Intercultural Communication*, New York: McGraw-Hill
- Kupper, Adam. (2000). "Antropologi" dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (Ed.) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mediakendari.com. (2025). Hasmito Dachlan Resmi Dikukuhkan Jadi Raja Bokeo Mekongga XXI, Pemkab Kolaka Siap Dukung Pelestarian Budaya, diakses pada 28 Oktober 2025, melalui: <https://mediakendari.com/hasmito-dachlan-resmi-dikukuhkan-jadi-raja-bokeo-mekongga-xxi-pemkab-kolaka-siap-dukung-pelestarian-budaya/>
- Mei, Reginaldis Taju; Farina, Agustin; Agung, Serli Ena. (2025). Kearifan Lokal "Peran Tradisi Masyarakat Adat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 9(6), pp. 155-160.
- Noya, Ekberth Vallen. (2023). Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup, *Balobe, Law Journal*, Vol. 3(2), pp. 71-80.
- Puri Agung Denpasar. (2019). Majelis Adat Kerajaan Nusantara, diakses pada 23 May 2025, melalui: [https://puriagungdenpasar.com/?page\\_id=1352](https://puriagungdenpasar.com/?page_id=1352)
- Samatan, Nuriyati. (2014). *Teori Komunikasi 2*, Jakarta: Penerbit Gunadarma.
- Samatan, Nuriyati. (2018). *Riset Komunikasi II*, Jakarta, Penerbit Gunadarma.
- Samatan, Nuriyati. (2023). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Membangun Suku Bangsa Banggai: Materi untuk SD*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Samatan, Nuriyati; & Abdul Barry, Fatharany Berkah. (2020). Myth of Boki Sea: An Observation of Banggai Matriarchal Cultural Values, *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Vol. 36(1), pp. 61-75.
- Samatan, Nuriyati; Pujiati, Desi; Robingah, Kuncoroyakti, Yohanes Ari; Nurlaila. (2024). Banunut As A Method of Value Inheritance In The Banggai Tradition, *IJMSSR International Journal of Management Studies and Social Science Research*, Vol. 6(1), pp. 1-11.
- Samatan, Nuriyati; Putra, Ariandi; Wahyudin; Robingah. (2023). Balêèle As a Ritual to Inherit Banggai Cultural Values, *International Journal of Advanced Multidisciplinary (IJAM)*, Vol.2(3), pp. 516-534.

- Samatan, Nuriyati; Yusriyah, Kiayati; Sariyati, Robingah; Nurainy, Renny. (2022). Code Mixing Among Millennials of Banggai Ethnic, *International Journal of Management Studies and Social Science Research (IJMSSR)*, Vol. 4(5), pp. 94-108.
- Simply Psychology. (2023). Social Identity Theory In Psychology (Tajfel & Turner, 1979), diakses pada May, 25<sup>th</sup> 2025, melalui: <https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html>
- Taniputra, Ivan. (2017). *Ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara: Hikayat dan Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Turner, John; Oakes, Penny (1986). "The significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence". *British Journal of Social Psychology*. 25(3): 237–252.
- Ujarancom. (2025). Melalui Musyawarah Madya MAKN Deklarasikan Peran Adat Nusantara untuk Kemajuan Bangsa. Diakses pada 29 Oktober 2025, melalui: <https://www.ujaran.co.id/2025/09/melalui-musyawarah-madya-makn.html>
- Voi.id. (2025). Deklarasi MAKN 2025: Dari Ekonomi, Budaya, hingga Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 21 Oktober 2025, melalui: <https://voi.id/ekonomi/519258/deklarasi-makn-2025-dari-ekonomi-budaya-hingga-pembangunan-berkelanjutan>
- Wawasan Kebangsaan. (2021). Bhinneka Tunggal Ika, diakses pada: 21 Oktober 2025, melalui: <https://wawasankebangsaan.id/bhinneka-tunggal-ika/>
- Zaini, Fawwaz. (2019). Sejarah Panjang Kerajaan Kutai, diakses melalui Artikel ResearchGate pada May 23<sup>th</sup>, 2025, melalui: [https://www.researchgate.net/publication/336870677\\_Sejarah\\_Panjang\\_Kerajaan\\_Kutai](https://www.researchgate.net/publication/336870677_Sejarah_Panjang_Kerajaan_Kutai)